

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Factors Affecting Poverty Levels in South Central Timor Regency

Kamilaus K. Oki¹, Emilia Khristina Kiha², Maria Yoanita Usfinit³

okitance@gmail.com¹, emilia.kiha02@gmail.com², nitausfinit@gmail.com³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor¹²³

Abstract

Poverty in Timor Tengah Selatan Regency is caused by natural, human, cultural and other resources. The government support factor in the allocation of the capital expenditure budget, social spending is very important. Physical isolation in the form of supporting infrastructure for resource mobilization has not been able to be overcome due to the limited allocation of capital expenditures. Likewise, the allocation of social spending to overcome social isolation in the form of poverty and inequality. Social spending and capital expenditures are financed by regional finances, originating from local revenues and central government fund allocations. The results showed that local revenue, capital expenditures and social spending had no significant effect on the poverty rate in Timor Tengah Selatan Regency.

Keywords: local revenue, capital expenditure, social funds, poverty

Abstrak

Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan disebabkan oleh sumber daya alam, manusia, budaya dan sumber daya lain. Faktor dukungan pemerintah dalam alokasi anggaran belanja modal, belanja sosial sangat penting. Isolasi fisik berupa infrastruktur pendukung mobilisasi sumber daya belum mampu diatasi karena keterbatasan alokasi belanja modal. Demikian juga alokasi belanja sosial untuk mengatasi isolasi sosial berupa kemiskinan dan ketimpangan. Belanja sosial dan belanja modal dibiayai oleh keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan alokasi dana pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja sosial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, Belanja Modal, Dana Sosial, kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah karena berdampak pada ketimpangan dan dimensi sosial lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nurmayanti (2013), kemiskinan bukan sekedar persoalan individu melainkan juga struktural. Pemerintah daerah dalam menelaah kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada semua sektor tanpa mengabaikan sektor lainnya. Hakekat tanggung jawab otonomi daerah akan permasalahan kemiskinan ada pada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan optimalisasi potensi sumber daya. Keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, sumber penerimaan berasal dari daerah itu sendiri berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, alokasi dana desa dan sumber penerimaan lainnya. Seluruh penggunaan pendapatan itu menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan data BPS Indonesia tahun 2020 bahwa Nusa Tenggara Timur berada pada urutan ketiga penduduk miskin tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Nusa Tenggara Timur penyumbang penduduk miskin terbesar adalah dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 28,06% (BPS TTS, 2018). Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani tradisional dengan pola tebas bakar dan berpindah-pindah. Orientasi tanaman pertanian masyarakat adalah tanaman umur pendek seperti padi, jagung, kacang-kacangan dan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan bukan orientasi pasar. Sekalipun demikian pola yang dilakukan masyarakat, namun kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki *curah hujan rata-rata* sebesar 1000-1500 mm/tahun sangat cocok untuk pengembangan pertanian umur panjang dengan orientasi pasar. Komoditas utama pertanian adalah apel dan jeruk sebagai khas daerah yang diusahakan secara tradisional oleh para petani dengan luas kebun yang ada. Namun demikian, pola pertanian tanaman ekonomis dan umur panjang belum mampu dikembangkan karena faktor pemahaman terbatas dan budaya masyarakat lokal dengan pengukuran status sosial menggunakan hasil panen tanaman umur pendek.

Ternak dan Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga memiliki komoditas unggulan yaitu Kayu Cendana dengan luas wilayahnya mencapai 3.947 kilometer persegi atau 8,34 persen dari luas Timor Tengah Selatan. Selain komoditas pertanian dan ternak Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengandalkan proyek pertambangan marmer yang ada di Mollo dan pertambangan Batu Warna di Kolbano sehingga mampu memberikan tambahan sumber pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tetapi potensi ini kurang adanya perhatian dari pihak pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan serta lemahnya sumber daya manusia masyarakat lokal. Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki kondisi topografi yang bergunung dan berbukit-bukit dengan tingkat keterlereng yang curam sehingga kegiatan perekonomian serta akses menuju tempat wisata terhambat dikarenakan alat transportasi darat dan prasarana jalan, jembatan dan irigasi belum memadai sebagai alat transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah memiliki beban belanja modal yang besar setiap tahunnya padahal jumlah pendapatan setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

Pengeluaran anggaran Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pengembangan belum optimal dan belum mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kemajuan daerah, mendukung pelestarian alam, kemajuan budaya masyarakat dan sumber daya lainnya. Selain belanja modal yang besar pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki beban pengeluaran belanja bantuan sosial yang jumlahnya cukup banyak setiap tahunnya.

Belanja Bantuan Sosial adalah Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi belanja bantuan sosial adalah menanggulangi kemiskinan yaitu orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Dana sosial dimaksudkan untuk memberi solusi kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi baik sifatnya sesaat atau permanen. Sifat sesaat adalah kebutuhan karena bencana yang tidak dapat diprediksi seperti covid 19. Bencana alam seperti angin puting beliung, longsor, tsunami, kebakaran dll. Bantuan sosial jangka panjang seperti keluarga tidak mampu ekonomi dan bantuan pendidikan, gizi buruk dan stunting dll. Pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengalokasikan belanja bantuan sosial belum maksimal dan terbatasnya efektifitas dan efisiensinya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme sehingga kemiskinan belum teratasi dengan baik. Berikut adalah tabel pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja sosial dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2002-2018.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Sosial dan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tahun 2002-2018

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (%)	Belanja Modal (%)	Belanja Sosial (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2002	9,06	9,04	4,14	42,66
2	2003	6,96	11,49	5,41	37,43
3	2004	7,57	4,18	3,61	37,38
4	2005	7,26	3,8	2,70	37,64
5	2006	3,64	22,38	0,66	39,93
6	2007	17,23	17,23	1,51	37,43
7	2008	3,98	30,05	1,13	33,55
8	2009	18,76	18,76	0,88	31,14
9	2010	3,58	9,56	0,64	28,71
10	2011	3,65	23,85	0,94	26,96
11	2012	3,73	12,82	0,60	27,49
12	2013	4,33	18,63	0,40	27,3
13	2014	5,78	19,53	0,41	26,79
14	2015	5,76	12,11	0,31	31,12
15	2016	5,00	17,03	0,10	29,89

16	2017	12,41	15,42	0,03	29,44
17	2018	5,67	19,92	0,03	28,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan murni dari daerah dengan memanfaatkan potensi lokal, kontribusinya masih sangat minim rata-rata dibawah 10 persen. Ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat dominan. Alokasi belanja modal membiayai pembangunan fisik masih sangat minim. Konsekwensi ikutan adalah ketersediaan infrastruktur merangsang ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah masih berjalan lamban. Akibatnya tingkat kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Selatan tidak mengalami penurunan yang signifikan, sementara belanja social untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di kabupaten Timor Tengah Selatan 0,83 persen.

Metode

Penelitian ini dilakukan kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber pendukung lainnya. Selanjutnya untuk mengukur kelayakan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik. Sebagaimana disampaikan oleh Rosita (2012), bahwa tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik meliputi;

1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah *kolmogorov smirnov test*, dalam uji ini H_0 yang diajukan adalah data observasi residual yang berdistribusi secara normal, dengan demikian jika hasil uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan angka yang signifikan (jauh di bawah $\alpha = 0,05$) berarti data residual yang di uji tidak normal, sebaliknya jika hasil uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan angka di atas 0,05 maka data residual observasi berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolonieritas dapat dilihat dengan mendasarkan nilai *tolerance* dan VIF pada hasil regresi dengan variabel kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas dalam model regresi ini. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonieritas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*) yang mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan vaians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola pada grafik dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksikan dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) (Ghozali, 2008).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antaraa kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau periode selanjutnya. Jika angka D-W berada antara -2 dan +2 maka tidak ada autokorelasi.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial sebagai berikut;

1. Analisis Deskriptif

Merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek yang diteliti. Dalam analisisnya, metode deskriptif dapat menggunakan tabel, grafik/diagram untuk menggambarkan fenomena sosial yang diamati.

2. Analisis Inferensial

Regresi Linier Berganda dimaksud untuk mengetahui pengaruh secara serentak antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Belanja Modal (X_2) dan Belanja Sosial (X_3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) menurut Seran, (2012) sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y : Variabel Tingkat Kemiskinan

β_0 : Konstanta intercept

β_1 : Koefisien regresi X_1

β_2 : Koefisien regresi X_2

β_3 : Koefisien regresi X_3

X_1 : Variabel Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Variabel Belanja Modal

X_3 : Variabel Belanja Sosial

Selanjutnya teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini sangat penting untuk menguji kebenaran yang masih diragukan kebenarannya. Sebagaimana dikatakan Rosita (2012), hipotesis hakekatnya adalah pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris Hipotesis yang telah dirumuskan tersebut perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan beberapa teknik sesuai dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Uji t

Digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas (*independen variable*) (X) terhadap variabel terikat (*dependen variable*) (Y). Jika t hitung $>$ dari t tabel pada alfa 0,05 dan derajat kebebasan ($n-K$) maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel variabel bebas (*independen variable*) (X) terhadap variabel terikat (*dependen variable*) (Y). dan sebaliknya jika t hitung $<$ dari t table pada alfa 0,05 dan derajat kebebasan ($n-K$), pada tingkat alfa = 0,05 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (*independen variable*) (X) terhadap variabel terikat (*dependen variable*) (Y).

2. Uji F

Digunakan untuk menguji taraf signifikan variabel variabel bebas (*independen variable*) (X) secara serentak atau simultan terhadap terhadap variabel terikat (*dependen*

variable) (Y). Bila F hitung > F tabel pada derajat kebebasan (N-K-1) dan tingkat alfa = 0,05 dan maka hubungan antara kedua variabel yang diuji terdapat pengaruh yang signifikan dan sebaliknya jika F hitung < dari f tabel pada derajat kebebasan (N-K-1) dan tingkat alfa = 0,05 maka hubungan antara kedua variabel yang diamati tidak signifikan.

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi adalah kontribusi besarnya nilai perubahan variabel bebas, semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan semakin besar, demikian pula sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif.

4. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya presentasi variasi nilai dari variabel tak bebas (Y) dijelaskan oleh variabel bebas (X). Rumusnya menurut Kuncoro (Seran, 2012)

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas maka pengambilan keputusan apakah data berdistribusi normal atau tidak maka cukup dengan membaca pada nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*). Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,693. Dikerenakan $0,693 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data untuk tiap variabel (Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, belanja sosial dan tingkat kemiskinan) telah berdistribusi normal.

Berikut ini disajikan tabel hasil Uji Normalitas data dengan menggunakan Metode *one sample kolmogrof simirnof*.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	.12568977
Most Extreme	Absolute	.168
Differences	Positive	.137
	Negative	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z		.693
Asymp. Sig. (2-tailed)		.723

a. Test distribution is Normal.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolonieritas dapat dilihat dengan mendasarkan nilai *tolerance* dan VIF pada hasil regresi dengan variabel kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas dalam model regresi ini. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonieritas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*) yang mana

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Dari tabel diatas *output coefficient* dibawah dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), variabel belanja modal (X_2) dan variabel belanja sosial (X_3) lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc	VIF
1 (Constant)	4.867	2.886		1.686	.116		
PAD	-.114	.065	-.449	-1.760	.102	.777	1.288
Belanja Modal	.019	.053	.089	.370	.718	.874	1.144
Belanja Sosial	.040	.047	.226	.858	.406	.730	1.370

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Dalam penelitian ini dengan uji gletser, dimana dalam bentuk pengujian ini dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika penyebarannya titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, jika penyebaran titik-titik terdapat pola yang dilihat bahwa penyebaran residual tidak teratur (tidak membentuk suatu pola tertentu). Kesimpulan yang bisa diambil bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas (gejala varians residual yang sama antar pengamatan) sehingga asumsi ini terpenuhi.

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan *Uji Durbin-Watson (DW test)*. Dari hasil uji tabel diatas terlihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 0,503. Nilai ini terletak antara -2 dengan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi. Pengambilan keputusan pada uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.585 ^a	.343	.191	.139	.343	2.260	3	13	.130	.503

a. Predictors: (Constant), Belanja Sosial, Belanja Modal, PAD

b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber : Olahan Data SPSS 16. Tahun 2020

Dalam regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu nilai residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas

dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan belanja sosial. Sedangkan yang menjadi variabel tetap (*dependent variable*) adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil rekapitulasi diketahui persamaan regresi linear berganda yang tertera dalam tabel diatas maka dapat dijelaskan Nilai β_0 artinya jika tidak ada perubahan pada variabel pendapatan asli daerah, variabel belanja modal dan belanja sosial maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 4,867. Nilai koefisien variabel regresi pendapatan asli daerah (β_1) bernilai negatif sebesar 0,114%. Artinya bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar 0,114% dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap. Untuk nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k - 1$ ($17 - 4 - 1 = 12$) memperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,178 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 1,760. Dengan demikian maka, nilai $t_{hitung} <$ dari nilai t_{tabel} dimana $1,760 < 2,178$ maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif tetapi tidak signifikan antara variabel PAD terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Nilai koefisien variabel regresi belanja modal (β_2) bernilai positif sebesar 0,019%. Artinya bahwa setiap peningkatan belanja modal sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,019% dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap. Untuk nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k - 1$ ($17 - 4 - 1 = 12$) memperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,178 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,370. Dengan demikian maka, nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} dimana $0,370 < 2,178$ maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara variabel belanja modal terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Nilai koefisien variabel regresi belanja sosial (β_3) bernilai positif sebesar 0,040%. Artinya bahwa setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,040% dengan asumsi nilai variabel independent lainnya tetap. Untuk nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k - 1$ ($17 - 4 - 1 = 12$) memperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,178 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,858. Dengan demikian maka, nilai $t_{hitung} <$ dari nilai t_{tabel} dimana $0,858 < 2,178$ maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara variabel belanja sosial terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Besarnya nilai koefisien korelasi (R) variabel pendapatan asli daerah, variabel belanja modal dan belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,585%, artinya hubungan antara variabel pendapatan asli daerah, variabel belanja modal dan belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang sedang. Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independent berpengaruh signifikan variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah variabel belanja modal dan belanja sosial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian menggunakan tingkat *alpha* sebesar 0,05.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,260 < 3,81$) H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan demikian maka pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja sosial tidak

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hipotesisnya ditolak.

Hasil penelitian Uji F menunjukkan secara bersama-sama ketiga variabel bebas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Alasan mengapa ketiga variabel tidak signifikan dikarenakan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kurang memaksimalkan potensi daerah yang ada, isolasi fisik, isolasi sosial masih sangat tinggi dan penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan terlalu banyak sehingga pembagian untuk bantuan sosial kurang merata. Hal ini juga bertentangan dengan teori keuangan daerah dan semangat Undang-Undang Otonomi Daerah.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukannya sumber-sumber pembiayaan, baik dari pusat maupun dari kemampuan daerah dalam menjangkau pendapatan asli daerahnya. Sumber pembiayaan itulah yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Oleh karena itu peran belanja modal ini sangat penting sebab jika disalurkan tepat sasaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Sedangkan belanja sosial Sesuai dengan aturan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka pos-pos yang paling vital menyentuh langsung kesejahteraan rakyat adalah Belanja Bantuan Sosial. pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan realisasi pembelanjaan tepat sasaran sesuai program kerja yang telah tersusun maka pengeluaran pemerintah akan berdampak positif terhadap perekonomian terutama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda yang kemudian dilakukan uji F dan uji t yang lebih menyatakan bebas dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa variabel independen pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R^2) yang dihasilkan dalam uji regresi berganda adalah sebesar 0,343. Artinya presentase sumbangan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Belanja Modal (X_2) dan Belanja Sosial (X_3) Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 34,3%, sedangkan sisanya sebesar 65,7%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Simpulan

Keuangan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah nilai kontribusi sangat kecil, sedangkan tingkat ketergantungan pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat sangat tinggi. Belanja modal alokasi untuk kebutuhan infrastruktur dalam rangka menunjang kebutuhan ekonomi masih sangat sangat minim, demikian juga untuk belanja sosial untuk mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian dengan menggunakan

regresi berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2018 Timor Tengah Selatan dalam Angka
- Ghozal, Imam. (2008) *structural E quation Medelling*. Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga. Nurmayanti, Dian Anggraini: Teori-teori Kemiskinan. *dianggraini06.blogspot.com/2013/10/teori-teori-kemiskinan.html*.
- Nurmayanti, D.A. 2013. Teori-teori kemiskinan
- Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media
- Rosita, Nadiyah Hirfiyana_(2012). Uji Asumsi Klasik. Management Department Faculty of Economics and Business University of Brawijaya.
- Seran Sirilius. 2012. Metode Penelitian Sosial dan ekonomi. Gita kasih: Kupang
- World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004